

Posisi Ruang Publik dalam Transformasi Konsep Urbanitas Kota Indonesia

¹Rony Gunawan Sunaryo, ²Nindy Soewarno, ³Ikaputra, ⁴Bakti Setiawan

Abstraksi

Kota-kota Indonesia dari awal terbentuk terus menerus mengalami transformasi melalui berbagai pengaruh kekuatan dan kekuasaan. Transformasi terjadi dari struktur kota tradisional menuju kota moderen, tidak saja secara fisik tapi juga transformasi konsep urbanitas warganya, dari konsep tradisional-informal menuju kepada konsep modern-formal. Kampung kota sebagai elemen kota khas Indonesia masih menyimpan sistem nilai urbanitas tradisional yang berbeda dengan konsep urbanitas moderen, kondisi ini berpotensi menciptakan konflik dalam ruang-ruang kota, ditambah lagi globalisasi sistem perkotaan yang menjadikan kita tidak dapat menolak sistem ekonomi pasar kapitalis membentuk ruang kota Indonesia. Ruang publik kota sebagai ruang konsensus warga kota merupakan indikator sejauh mana proses transformasi konsep urbanitas warga kota terbentuk. Lebih lanjut, ruang publik kota merupakan katalis dalam pembentukan konsep urbanitas yang setara di seluruh warga kota dan menjadi bekal utama kota bertransformasi menuju nilai-nilai baru.

Kata kunci :

Konsep Urbanitas, Ruang Publik, Kampung kota, Tranformasi Kota

Kampung Kota dan Transformasi Urbanitas Ruang Kota Indonesia

Berbeda dengan kota-kota Eropa yang mengalami transformasi karena pengaruh teknologi dan industrialisme, kota-kota Indonesia mengalami pengaruh-pengaruh yang lebih kompleks. Periode-periode kekuasaan yang beralih dari kerajaan pra VOC, kolonialisme Hindia Belanda dan Republik menjadi lapisan-lapisan yang mewarnai kolase kota-kota kita.

Pada konteks kota-kota Jawa, sudah banyak ahli dalam dua dekade terakhir yang menaruh fokus pada perlunya mendefinisikan kembali konsep urbanitas khas kota Indonesia. Santoso (2006, 2008) misalnya, menyebutkan bahwa konsep ruang publik kota tidak dikenal dalam kota-kota Jawa, lebih dikarenakan faktor budaya dan sejarah bermukim kita yang berangkat dari tipologi kampung, bukan dari tipologi kota sebagaimana dipahami dunia barat. Wiryomartono (1995), memperjelas bahwa konsep kota di Jawa dipahami sebagai konsep kuta-negara, merupakan sekumpulan teritori kampung-kampung yang otonom dengan penguasa kampung. Dalam lingkup kampung-kampung ini, warga secara otonom mengorganisasi relasi sosial, ekonomi budaya dan bahkan politiknya, kesemuanya termanifestasikan dalam tatanan spasial dan hirarki ruang mulai dari ruang privat, semi privat, semi publik, sampai kepada ruang publik.

Sementara itu dalam lingkup waktu yang terus berjalan, konsep ini terus terpelihara sejak awal terbentuknya kota pra kedatangan VOC, kolonial Hindia Belanda, hingga periode Republik. Tipologi kampung dalam banyak kajian perancangan dan perencanaan kota telah diakui sebagai elemen penting

¹ Rony Gunawan Sunaryo, ST., MT., IAI; Jurusan Arsitektur, FTSP, Universitas Kristen Petra; Mahasiswa Program Doktor Jurusan Teknik Arsitektur & Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada; ronygunawan@petra.ac.id

² Prof. Ir. Nindy Soewarno, M.Phil., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

³ Ir.Ikaputra, M.Eng., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

⁴ Prof. Ir. Bakti Setiawan., MA., Ph.D; Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

dalam memahami kota-kota Indonesia, khususnya Jawa. Pada masa kolonial, lapisan kota yang berkarakter modern sudah masuk dan memberi warna pada ruang-ruang kota kolonial, akan tetapi alih-alih menghapuskan tipologi kampung tradisional, kehadirannya justru memberikan karakter kota yang dualitis : moderen-tradisional. Lapisan kota yang moderen terbatas dihuni oleh warga Eropa (Santoso, 2006, Zaidulfar,2002).

Tentu saja peralihan kekuasaan dari kolonial kepada Republik Indonesia memberikan pengaruh besar bagai karakter kota-kota kita, terutama dari segi demografi. Dualisme konsepsi ruang-ruang kota moderen yang tadinya eksklusif dimiliki oleh warga Eropa dan konsepsi kampung-kampung yang dihuni pribumi dan kelompok warga lainnya menjadi baur. Tidak lagi ditemukan segregasi teritori berdasarkan etnis, agama, suku dan ras dalam organisasi spasial yang baru ini. Toh, dalam kurun waktu enam dekade kekuasaan Republik, struktur fisik kampung-kampung kota tidak mengalami banyak perubahan. Saat ini misalnya, kita masih dapat melihat dibalik blok-blok bangunan moderen di jalan-jalan utama kota terpelihara struktur ruang kampung dengan karakter spesifik kepadatan hunian yang tinggi dan gang-gang sempitnya.⁵

Dalam kondisi kepadatan hunian yang tinggi dan keterbatasan ruang, penduduk kampung melakukan adaptasi dan toleransi keruangan yang sedemikian luar biasa. Hampir tidak ada sejenkal ruang di kampung yang tidak digunakan untuk aktivitas atau penggunaan warganya. Lebih sering terjadi penumpukan aktivitas dalam satu ruang yang dibagi berdasar waktu. Kondisi ini jauh berbeda dengan struktur ruang kota moderen, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun developer swasta. Ruang-ruang diorganisasi secara rasional dan fungsional, cenderung dizonasikan kedalam kelompok-kelompok terpisah : hunian-kerja-rekreasi. Disertasi Zaidulfar (2002) menyebutkan lapisan kota moderen ini sudah dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda, dilanjutkan pada masa republik dengan pengaruh pemikiran dan konsep internasionalisme dalam perencanaan kota, sebagai sebuah bentuk yang ekstrim dalam penerapan konsep yang semula tumbuh dari budaya Eropa, kemudian dicobakan pada suatu konteks yang sangat berbeda, baik secara fisik, ekonomi maupun sosio kultural. Gagasan kota yang mekanis dan membagi area kota atas fungsi-fungsi secara *fixed* ini juga menjadi model di kota-kota dunia ketiga.

Melalui uraian ini didapat gambaran utuh mengenai proses transformasi yang terjadi dari kota-kota Indonesia dari struktur tradisional menuju struktur kota moderen. Mengacu pada konsepsi kota modern adalah sebuah ekosistem artifisial yang diciptakan demi kelangsungan hidup sebuah komunitas urban. Ekosistem tersebut pada konteks kekinian hanya dapat berjalan baik bila didasarkan pada konsep kehidupan bersama yang berdasar pada kaidah kehidupan moderen yang rasional (Santoso, 2006). Lebih lanjut Santoso menegaskan bahwa ada suatu konsepsi urbanitas yang perlu dipelajari penghuninya untuk dapat menghuni sebuah kota. Menjadi penting melihat bagaimana elemen-elemen fisik kota Indonesia telah berubah kepada sistem perkotaan modern. Tapi yang paling penting adalah melihat apakah masyarakat penghuninya juga telah bertransformasi dari konsepsi menghuni kota tradisional menuju konsepsi menghuni kota modern.

Ruang Publik sebagai Elemen Signifikan Transformasi Ruang Kota

Kota terbentuk dari kumpulan bangunan dan orang (Kostof, 1991) sementara Nas (1986, dalam Zaidulfar, 2002) memberi lima aspek utama sebuah kota : suatu lingkungan material buatan manusia, sebuah pusat

⁵ Berdasarkan pengamatan umum pada kasus kampung kota di Yogyakarta, Setiawan (2005) membuat kategorisasi kampung : (1) Kampung tradisional : Kampung yang didirikan pada periode awal pembentukan kota dan merupakan kawasan khusus untuk komunitas spesifik. Kampung-kampung ini berlokasi dekat dengan keraton dan melalui namanya dapat dilihat karakter umum kampung tersebut. (2) Kampung Tepi Sungai : Merupakan kampung yang berlokasi di tepian tiga sungai yang melintasi kota. Permasalahan legalitas dan formalitas hunian menjadi topik umum dalam membahas kampung dengan kategori ini. (3) Kampung Pinggiran Kota : Merupakan transformasi dari dari permukiman rural yang berubah wilayahnya karakter menjadi lebih kekotaan. (4) Kampung liar : Merupakan permukiman yang dibangun diatas lahan kosong tidak terurus di wilayah kota seperti kuburan Cina yang terlantar, tepi sungai, bantaran rel kereta.

produksi, komunitas sosial, komunitas budaya, dan suatu masyarakat terkontrol. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat aspek fisik ruang dan komunitas sebagai pembentuk kota.

Konsepsi kota moderen menegaskan bahwa ruang-ruang kota (*urban space*) terdiri dari organisasi ruang –ruang privat dan publik dimana masyarakatnya memiliki konsepsi urbanitas yang setara, memiliki tujuan sama untuk hidup berbagi secara bersama (Santoso, 2006). Lebih lanjut Madanipour menjelaskan bahwa melihat perbedaan antara publik-privat adalah satu cara untuk menterjemahkan dan menginterpretasi organisasi sosial, politik dan spasial dalam sebuah kota.

Bagaimana ruang-ruang kota (publik dan privat) diorganisasikan adalah manifestasi dari sistem nilai yang dianut masyarakatnya. Pada konteks ini kita bisa melihat dimana proses-proses pembelajaran hidup berkota dimulai, pada saat masyarakat kota melakukan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan dalam mengatur penggunaan ruang komunalnya, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa melalui ruang publik kita dapat meneropong sejauh mana taraf masyarakat kota kita telah menemukan konsepsi urbanitas nya, konsepsi mengenai hidup bersama dalam satu wilayah.

Perspektif perancangan kota melihat ruang publik sebagai fokus utama dalam proses dan produknya, sementara karakter-karakter ruang publik sendiri adalah:

1. **Ruang tempat masyarakat berinteraksi, melakukan beragam kegiatan secara berbagi dan bersama, meliputi interaksi sosial, ekonomi dan budaya, dengan penekanan utama pada aktivitas sosial.** Ruang publik menjadi wadah kegiatan komunal interaksi masyarakat dimana terjadi beragam aktivitas, merupakan ruang dimana masyarakat berbagi ruang dan waktu untuk aktivitasnya.
2. **Ruang yang diadakan, dikelola dan dikontrol secara bersama - baik oleh instansi publik maupun privat - didedikasikan untuk kepentingan dan kebutuhan publik.** Saat ini semakin banyak ruang-ruang publik kota yang terprivatisasi atau sebaliknya semakin banyak ruang-ruang milik privat yang membuka aksesnya bagi publik, dan fenomena ini terus berlanjut (Ikaputra, 2004; Lang, 2005). Perubahan ideologi, politik dan budaya menjadi beberapa faktor perubah status kepemilikan ruang publik, meskipun demikian, dalam konteks perubahan ini pun tetap dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang yang didedikasikan untuk kepentingan dan kebutuhan publik dapat didefinisikan sebagai ruang publik. Aspek kendali ruang ditekankan adalah hasil konsensus atau kesepakatan bersama, bukan individu atau sekelompok kecil orang yang tampak tegas dalam ruang-ruang privat.
3. **Ruang yang terbuka dan aksesibel secara visual maupun fisik bagi semua tanpa kecuali.** Sebuah ruang publik harus terbuka bagi semua orang dari latar belakang tanpa perkecualian. Sebuah ruang dinyatakan sebuah ruang publik karena ia aksesibel baik secara fisik maupun visual bagi semua orang.
4. **Ruang dimana masyarakat mendapat kebebasan beraktivitas.** Penekanan adalah pada kebebasan ekspresi dan aktualisasi diri dan kelompok, meski demikian bukan kebebasan tanpa batas. Kontrol norma, aturan dan regulasi tetap ada dan disepakati bersama. Meskipun pada beberapa pendapat mendeskripsikan ruang publik harus bebas biaya (Purwanto, 2004; Danisworo, 2004), pada kenyataannya dimensi fiskal selalu menjadi aspek penting dalam pengelolaan ruang publik. Sebuah ruang publik – demi menjaga daya dukungnya - memerlukan biaya dalam pengadaan dan pemeliharaannya, meskipun dimiliki oleh instansi publik. Komponen pembiayaan bisa bersifat langsung melalui tiket masuk atau retribusi, atau berupa pajak masyarakat. (Gaventa, 2006; Lang, 2005) Pada perkembangannya saat ini pun baik institusi publik maupun swasta melihat ruang publik sebagai komoditi investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Morfologi Ruang Publik Kota Indonesia

Mengacu pada teori klasik ruang kota, kita menemukan Spreiregen (1965) yang mendefinisikan bahwa ruang-ruang kota terbentuk dari permukaan kota sebagai lantainya dan fasad bangunan sebagai pelingkup (*enclosure*) nya. Purwanto (2007) mendefinisikannya sebagai ruang antara yang dibatasi oleh pelingkup

yang membentuk suatu place yang berada dalam situasi kehidupan perkotaan. Sedangkan bentuk-bentuk ruang publik kota tradisional secara umum adalah *street* dan *square* (Krier, 1979).

Perlu dicermati bahwa secara morfologi konsep ruang kota di Barat berbeda dengan yang ada di Timur, terutama Asia. Konsep Eropa menjadikan ruang kota sebagai tujuan dari pembentukan massa-massa bangunan yang melingkupinya, sedangkan konsep Asia cenderung menjadikan ruang kota adalah akibat dari pembentukan massa bangunan (Zahnd, 1999). Hal ini cukup menjelaskan mengapa kota-kota tradisional kita tidak mengenal bentuk-bentuk ruang publik yang menaruh fokus pada estetika dan enclosure nya seperti *plaza* atau *boulevard*.

Carr dkk (1992) menyusun tipologi ruang publik secara komprehensif berdasar seluruh penggunaan publik pada ruang-ruang kota sepanjang sejarah di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tipologi yang dipaparkan oleh Carr, tidak terlihat penekanan dari segi bentuk geometrisnya. Klasifikasi Carr lebih menekankan kepada karakter kegiatan, lokasi dan proses pembentukannya. Carr dkk membagi tipologi ruang publik menjadi 11 tipe :

1. Taman publik
2. Square dan Plaza
3. Memorial
4. Pasar
5. Jalan
6. Taman bermain
7. Ruang terbuka komunitas
8. Jalur hijau
9. Perbelanjaan dalam ruang
10. Ruang spontan dalam lingkungan hunian
11. Tepi air

Sementara itu untuk melihat tipologi ruang publik kota Indoensia, kita perlu melihat kembali konteks sejarah kota-kota kita dimana pada setiap periode pembentukannya (pra VOC, kolonial Hindia Belanda dan Republik) tidak dikenal konsepsi kepemilikan publik dalam pengertian warga kota secara keseluruhan. Jengkal-jengkal ruang kota pada konsepsi kota tradisional dikuasai oleh Penguasa Kerajaan, pada periode kolonial ruang-ruang kota dibiarkan terbagi dalam kelompok-kelompok komunitas yang terpisah teritori. Apabila kita perbandingan tipologi ruang publik kota Jawa dengan tipologi dari Carr, mungkin hanya bentuk jalan, pasar dan ruang spontan hunian yang serupa.

Bukan berarti kita tidak mengenal tipologi ruang publik formal, pada masa Republik pembangunan ruang-ruang publik seperti taman rekreasi, kebun binatang, stadion olahraga merupakan fasilitas formal kota yang ditujukan untuk aktivitas sosial rekreasi warga kota nya. Sampai dekade 80-an pemerintah secara proaktif mengembangkan permukiman formal baik berbentuk *landed house* maupun rumah susun. Pada perkembangan dua dekade terakhir, agaknya perhatian pada kampung kota sebagai elemen penting kota yang sempat diinisiasi oleh Karsten di tahun 30-an dilanjutkan oleh Purbo dan Silas di dekade 70-an dengan KIP agaknya melemah. Inisiasi pembangunan perkotaan dilepaskan pada pengembangan-pengembang dan investor swasta yang kemudian membangun pusat perbelanjaan, perumahan kelas menengah ke atas, apartemen, superblok, kawasan rekreasi yang menjadi tipologi baru ruang-ruang publik kota kita. Kuatnya modal dan kemampuan pengelolaan yang optimal dari ruang-ruang publik baru ini menjadikan ruang-ruang publik yang dikelola oleh pemerintah 'kalah bersaing', bahkan cenderung ditinggalkan, contoh kasus konflik di Kebun Binatang Surabaya merupakan ilustrasi jelas fenomena ini.

Kampung kota seakan menjadi 'anak tiri' dari kota, dibiarkan berkembang sendiri tanpa pendampingan, atau justru mengalami pemusnahan karena digantikan struktur kota yang lebih moderen. Sejalan dengan pembiaran ini, warga menjadi terlatih mandiri dan kreatif dalam pemanfaatan ruang-ruang yang semakin terbatas. Pembentukan ruang-ruang privat dan publik di kampung-kampung tidak pernah berlangsung secara formal dan *by design*, ruang-ruang publik terbentuk secara informal dan alamiah sesuai kebutuhan yang muncul saat itu. Bisa saja berupa sudut jalan, ruang antara rumah, sumur tempat mencuci warga.

Penyediaan ruang publik formal yang sebagian besar disediakan oleh swasta seperti mal, fasilitas olahraga, pusat rekreasi modern, café, cinema dan sebagainya cenderung mensyaratkan kemampuan finansial yang kuat sementara tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhinya. Sebagai pemenuhan dari kebutuhan aktivitas sosialnya di kota sebagian warga membentuk ruang-ruang publik informal dan spontan yang terbentuk dari konsepsi ruang di kampung-kampung kota. Pemanfaatan lahan-lahan secara spontan menjadi ciri khas bentuk ruang publik informal, bentuknya sangat beragam, dari yang bersifat netral seperti berkumpul di tepi jembatan sekedar melihat orang lewat, berkumpul di tepi rel kereta untuk melihat kereta lewat sampai kepada kegiatan yang mengundang konflik pemanfaatan ruang seperti pemanfaatan trotoar untuk berjualan dan makan, aktivitas rekreasi dan komersial di area privat.⁶

Apabila Anda melihat bahwa okupansi trotoar untuk berjualan, mangkal ojek atau becak sebagai sesuatu penggunaan yang keliru dan *kampungan*, maka kemungkinan besar Anda bermukim di bagian kota yang moderen atau bilapun tidak Anda adalah seorang akademisi yang memahami bagaimana seharusnya aspek rasional dan fungsional ruang-ruang kota diterapkan. Berbeda bila Anda memiliki penilaian bahwa pemanfaatan itu merupakan bentuk optimasi ruang kota yang tidak tergunakan (tingkat penggunaan trotoar di kota-kota kita oleh pejalan kaki memang rendah diakibatkan minimnya fokus pengelolaan transportasi kota), maka bisa jadi Anda adalah bagian dari masyarakat kota yang bermukim di kampung kota.

Ilustrasi di atas hanya merupakan gambaran bagaimana konflik yang terjadi dalam ruang-ruang publik kota kita sesungguhnya merupakan perbedaan nilai-nilai urbanitas yang dianut. Pihak satu menganut optimasi lahan dan pemanfaatan lahan kosong sebesar-besarnya, sedang pihak lain menganut konsepsi bahwa ruang publik kota dalam cara apapun tidak bisa diokupansi untuk kepentingan seseorang atau kelompok kecil. Pemetaan pada ruang-ruang publik kota akan membantu kita keragaman konsepsi urbanitas dalam masyarakat kota kita.

Relevansi Ruang Publik sebagai Bagian Transformasi Urbanitas Kota

Menjadi sulit dalam konteks perkembangan ruang kota yang dikuasai pasar, karena pembentukan ruang-ruang publik kota dengan sendirinya terbentuk oleh kepentingan pasar yang berorientasi pada kepentingan satu atau sedikit kelompok. Secara parsial bisa saja dikatakan bahwa superblok atau supermal merupakan bentuk ruang-ruang kota yang baru, dimana terbentuk pula ruang-ruang publik kota yang baru, toh di dalamnya terbentuk pula interaksi sosial masyarakat urban yang baru. Akan tetapi bila kita kritis pada konsepsi publik, bahwa ruang publik kota merupakan ruang yang diadakan dan dikelola bersama oleh publik untuk kepentingan publik (Carr et al,1992; Carmona, 2003; Madanipour, 2003), maka sesungguhnya dapat kita lihat bahwa apa yang kita lihat di permukaan sebagai bentuk interaksi sosial di mal, café, *citywalk* atau *alfresco* sesungguhnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil lapisan masyarakat kota yang mampu memenuhi satu prasyarat di ruang publik baru tersebut : berbelanja atau membayar.

Membiarkan transformasi ruang –ruang publik kota kita dikuasai oleh kepentingan pasar, sama dengan mengembalikan urbanitas kita kepada masa kolonial Hindia Belanda, dimana terdapat dualisme struktur kota yang hidup berdampingan *bebouwde kom* dan *niet-bebouwde kom* (daerah yang dikembangkan dan daerah tidak dikembangkan). Terlalu naif jika mengharapkan pasar (dalam hal ini investor swasta) memiliki idealisme untuk mengembangkan ruang-ruang publik kota yang mengakomodasi semua lapisan masyarakat. Hukum ekonomi yang ada bertentangan dengan fakta bahwa sebagian besar masyarakat perkotaan kita adalah kelompok menengah ke bawah.

⁶ Melihat fenomena dua dekade terakhir, pemanfaatan publik untuk aktivitas rekreasi juga terjadi pada lahan-lahan privat, dekade 90-an kita bisa melihat setiap sore dan terutama minggu pagi aktivitas masyarakat kota berekreasi (olahraga, berjalan-jalan atau sekedar berkumpul) di lahan-lahan luas milik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Hanya saja satu dekade terakhir pola pemanfaatan publik berubah ke arah aktivitas komersial dan dengan karakter yang masif sehingga di tahun 2008 pihak otorita UGM merasa perlu mulai melakukan pembatasan-pembatasan melalui pembatasan akses publik, lokalisasi PKL dan lokalisasi even publik.

Kondisi ini cukup dimengerti oleh Pemerintah Kota masa kini untuk secara seimbang menaruh perhatian pada pengembangan ruang-ruang publik kota yang relatif aksesibel bagi semua lapisan masyarakat. Kota Yogyakarta misalnya memiliki ruang-ruang publik kota yang diadakan, dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan publik semua lapisan seperti Taman Pintar, Malioboro, Alun-alun⁷. Pada konteks yang bersifat mikro, perhatian Pemerintah Kota terlihat pada pembuatan-pembuatan kanopi vegetasi pada trotoar, bahkan memasukkannya sebagai prasyarat pengajuan IMBB bangunan baru.

Pemerintah Kota Surabaya juga meletakkan perhatian pada keseimbangan ruang publik kota bagi semua lapisan warga melalui pembangunan taman-taman kota untuk penggunaan aktif interaksi sosial antara lain Taman Bungkul, Taman Flora, Taman Prestasi, Taman Apsari, Taman Persahabatan. Demikian juga upaya-upaya pemberdayaan warga kampung kota untuk penghijauan dan penyehatan komunitas kampung melalui program “green & clean”, urban farming, 3R, dll.

Meskipun langkah yang dilakukan Pemerintah Kota dominan menggunakan paradigma perancangan yang positivistik dan deterministik dan sering bersifat satu arah (ini dapat dipahami mengingat kendala birokrasi yang terikat dengan periode anggaran, tidak cukup waktu untuk menggunakan metode partisipasi yang cenderung memakan waktu lama), contoh-contoh kasus ini cukup menggambarkan bahwa sudah ada langkah nyata dari otorita pemerintah kota untuk menyeimbangkan kehidupan publik di ruang-ruang kota, kondisi ini merupakan titik cerah dari awal perancangan kota menuju konsep urbanitas yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan setahap demi setahap dalam pendekatan perancangan dan pengelolaan ruang publik tentunya perlu menjadi perhatian bersama antara lain dengan melibatkan semua semua pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, konsultan-akademis, dan warga kota, masyarakat pengguna dalam merencanakan dan merancang ruang publik kota, dengan demikian terjadi sinergi yang positif dan saling menguntungkan.

Tipologi hunian kampung kota bukanlah sebuah entitas yang harus dihapus atau digantikan dengan konsep superblok moderen misalnya. Mempertimbangkan kepada konteks sejarahnya sebagai bagian yang terus ada dalam morfologi kota-kota kita, entitas ini harus dipandang sebagai satu warisan elemen perkotaan yang asli Indonesia. Sebaliknya menyangkal nilai-nilai moderen dan kapitalis dan peran ekonomi pasar dalam era globalisasi kota-kota di dunia juga merupakan pilihan rasional. Perhatian yang perlu adalah pada bagaimana proses transformasi konsepsi urbanitas yang heterogen menjadi setara dan seimbang di antara seluruh lapisan warga yang tinggal di dalam kota, dari sistem nilai tradisional menuju sistem nilai moderen, kemudian menuju sistem nilai global.

Pada konteks ini, peran ruang publik kota menjadi signifikan, selain sebagai wadah bertemunya (*melting pot*) seluruh warga kota dengan berbagai ragam nilai yang dianutnya, menjadi katalisator kegiatan-kegiatan sosial-rekreasi-budaya warga kota. Melalui interaksi sosial yang diakomodasi dalam ruang publik terjadi pembelajaran antara manusia satu dengan yang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain, berlangsung terus menerus hingga akhirnya terdapat kesatuan pemahaman bersama bahwa heterogenitas yang ada dalam satu kota merupakan keniscayaan yang harus dijalani dan diterima bersama-sama. Pada tahap inilah konsepsi urbanitas yang solid seutuhnya terbentuk, dan inilah bekal utama dalam transformasi kota-kota kita menuju setiap nilai-nilai baru.

Kepustakaan

Carmona, M., Heath, T., Oc, T. & Tiesdell, S. 2003. *Public Places Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design*. Architectural Press.

Carr, S., Francis, Mark., Rivlin, Leanne G. & Stone, Andrew M. 1992. *Public Space*, Cambridge University Press. Cambridge.

⁷ Pada contoh ini, pola penggunaan publik yang berlebihan pada kasus Alun-alun sesungguhnya masih menyimpan konflik dengan kepentingan lain seperti aspek konservasi kawasan bersejarah, sehingga perlu peninjauan kembali untuk penggunaan jangka panjang.

- Gaventa, S. 2006. *New Public Space*. Mitchell Beazley-Octopus Publishing Group Ltd, London.
- Ikaputra. 1999. *Personal Space*, dalam Paper Seminar pada acara Arsitek(tur) Kontemporer Indonesia, Tarumanagara Tapes, Jurusan Arsitektur, FT, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 17-18 Nopember.
- Ikaputra. 2004. *Towards Open and Accessible Public Places*, Conflict and Compromise dalam *Proceedings Managing Conflicts in Public Spaces Trough Urban Design*, 1st International Seminar National Symposium, Exhibition, and Workshop in Urban Design, Prayitno, B.; Poerwadi, Setiawan, A.T.; Aji, D.P. (ed) Master Program in Urban Design, Postgraduate Program, Gadjah Mada University.
- Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan, Membangun Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta.
- Kostof, Spiro. 1992, *The City Assembled: The Elements of Urban Form Trough History*, Thames and Hudson Ltd. London.
- Krier, Rob. 1979 *Urban Space*. Academy Edition, London.
- Lang, J. 2005. *Urban Design, A Typology of Procedures and Products*. Architectural Press.
- Madanipour, Ali. 1996, *Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-spatial Process*. John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
- Madanipour, A. 2003, Why are the Design and Development of Public Spaces Significant for Cities? Dalam *Designing Cities, Critical Readings in Urban Design*; Cuthbert, A.R.(ed), Blackwell Publishing.
- Moughtin, Cliff. 1992. *Urban Design: Street and Square*. Butterworth-Heinemann. Oxford.
- Purwanto, E. 2007. *Rukun Kota (Ruang Perkotaan Berbasis Budaya Guyub), Poros Tugu Pal Putih sampai dengan Alun-Alun Utara Yogyakarta*. Disertasi Program Doktor, tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Rismaharani, T.R. 2010. *Pengembangan Kota Surabaya Melalui Pembangunan Psikologis dan Spasial Kota Menuju Kota yang Berkelanjutan*, Paper Seminar pada Seminar Nasional tentang Arsitektur (di) Kota “Hidup dan Berkehidupan di Surabaya”, Jurusan Arsitektur, FTSP, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 27 Mei.
- Rivlin, L.G. 2007. *Found Spaces: Freedom of Choice in Public Life* dalam *Loose Space Possibility and Diversity in Urban Life*; Franck, K.A. & Stevens, Q.(ed), Routledge, New York.
- Santoso, J. 2006. *[Menyiasati] Kota Tanpa Warga*. Kepustakaan Populer Gramedia – Centropolis, Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Santoso, J. 2008. *Arsitektur – Kota Jawa, Kosmos, Kultur & Kuasa*, Centropolis, Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Santoso, J. 2010. *Proses Urbanisasi dalam Konteks Globalisasi : Surabaya, Beberapa Pemikiran Mengenai Kemandirian dan Keanekaragaman Kultural*, Paper Seminar pada Seminar Nasional tentang Arsitektur (di) Kota “Hidup dan Berkehidupan di Surabaya”, Jurusan Arsitektur, FTSP, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 27 Mei.
- Setiawan, B., 2005. *Yogyakarta City in Transformation : The Need for A Better Planning Approach*. Jurnal Perencanaan Kota dan Daerah, Volume 1, Nomor , Edisi 1, Universitas Gadjah Mada.
- Spreiregen, P.D. 1965. *Urban Design : The Architecture of Towns and Cities*. McGraw-Hill Book Company. New York.
- Subangun, E. 2004. *In Search of The Understanding The Concept of Conflict in The Public Space* dalam *Proceedings Managing Conflicts in Public Spaces Trough Urban Design*, 1st International Seminar National Symposium, Exhibition, and Workshop in Urban Design, Prayitno, B.; Poerwadi,

- Setiawan, A.T.; Aji, D.P. (ed) Master Program in Urban Design, Postgraduate Program, Gadjah Mada University.
- Sunaryo, R.G. 2002. *Penataan Ruang Publik yang Memadukan Pola Aktivitas dengan Perubahan Fisik Kawasan, Kasus Kawasan Tambak Bayan, Babarsari, Yogyakarta*. Tesis Program Magister, tidak dipublikasikan, Institut Teknologi Bandung.
- Sunaryo, R.G. 2008. *Isu Transformasi Spasial, Sebuah Kajian Teoritik Empirik*. Paper Kuliah Mandiri, Program Doktor Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.
- Sunaryo, R.G.; Soewarno, N; Ikaputra; Setiawan, B. 2010. *Perubahan Setting Ruang dan Pola Aktivitas Publik di Ruang Terbuka Kampus UGM*. Paper Kumpulan Makalah pada Seminar Nasional Riset Arsitektur & Perencanaan 1, IAP DIY – APRF – JUTAP UGM, Yogyakarta, 16 Januari.
- Wiryo Martono, A.B.P., 1995. *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia; Kajian mengenai konsep, struktur, dan elemen fisik kota sejak peradaban Hindu-Budha, Islam hingga sekarang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zahnd, M. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu, Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Zaidulfar, E.A. 2002. *Morfologi Kota Padang*, Disertasi Program Doktor, tidak dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada.